



ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Realistiskan Dengan Target

KETUA Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur mengatakan, sebaiknya penyusunan anggaran jalan, jembatan, dan infrastruktur lain di APBD 2021 dan mendatang realistis dengan target yang akan dikejar.



Subhan Nur

Masalahnya gara-gara pandemi Covid-19, dari tahun ke tahun terjadi penurunan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Misalnya tahun 2018, dianggarkan Rp700 miliar. Tahun 2019 turun Rp300 miliar. Padahal target yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kalbar 2018-2023, jalan provinsi kondisi mantap pada angka 80 persen.

Untuk tahun 2021, anggaran di Dinas PUPR lebih rendah dibandingkan Dinas Perkim. Di Perkim sekitar Rp500 miliar lebih. Sementara PUPR berkisar di angka Rp300 miliar lebih. Target 66 persen tahun 2021 yang digaungkan harus ditambah porsi anggarannya.

Dia pun meminta dinas teknis untuk porsi anggaran menyesuaikan dengan target RPJMD Kalbar. Untuk infrastruktur jalan dari revisi RPJMD 2018-2023, jalan provinsi dengan kondisi mantap ditargetkan mencapai 80 persen. Dana dibutuhkan daerah kurang lebih Rp7 triliun mencapai jalan mantap mencapai 100 persen.

“Dari aspek-aspek penganggaran, mengejar target 80 persen jalan mantap, anggaran wajib di atas Rp500 miliar,” katanya. Selain masalah aspek penganggaran, aspek perencanaan juga menjadi masukan Komisi V DPRD Kalbar. Berdasarkan evaluasi dan pantauannya on the spot DPRD, sejumlah jalan yang baru dikerjakan sudah muncul kerusakannya. Misalnya jalan provinsi di Kabupaten Sambas dari Simpang Bantan I-II hingga Tanah Hitam, sudah berlubang.

Artinya, lanjut dia, dari aspek-aspek perencanaan ini harus menjadi sesuatu yang penting. Banyak hal sesuai dengan perencanaan, ada juga tidak sesuai setelah melakukan kegiatan on the spot ke lapangan. “Kan jadi pertanyaan kita, jalan yang baru dikerjakan sampai ke Tanah Hitam sudah bolong-bolong. Artinya belum diharapkan seperti dalam aspek perencanaan kalau meligir indikator kendaraan dengan kapasitas tonase besar sekitar 14 ton lebih,” jelasnya.

Politisi Partai NasDem Kalbar ini menambahkan bahwa target-target yang ingin dicapai Gubernur harus sesuai RPJMD, dimana dinas teknis di bawahnya harus dapat mengawasi secara menyeluruh. Percepatan pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan indeks infrastruktur sebagai visi misi kepala daerah harus diselenggarakan. *(den)*